

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Opini Politik

2.1.1 Pengertian Opini

Menurut Slameto (2001: 20), opini adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Opini atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek berbeda-beda, yaitu positif (baik), netral (biasa saja) dan negatif (buruk).

Pengertian di atas menekankan bahwa opini bukan hanya sebatas pada pengindraan terhadap obyek atau lingkungan saja, akan tetapi lebih luas seseorang yang mengalami atau mengamati terhadap obyek atau lingkungan yang memberikan tanggapan kesan kepadanya, sehingga ia dapat memberikan suatu penilaian pandangan atau pendapat.

Menurut Mar'at (1999: 73), opini merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Jadi komponen kognisi akan berpengaruh terhadap prediposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap suatu

obyek, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipikirkan atau diopinikan tentang obyek tersebut.

Pengertian di atas menekankan bahwa opini merupakan suatu proses pengamatan terhadap sesuatu objek yang didalamnya menyangkut tanggapan kebenaran langsung, keyakinan terhadap objek tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap predisposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang diopinikan tentang suatu objek tersebut. Secara umum dan keseluruhan, opini dapat diartikan sebagai kesan-kesan, penafsiran seseorang terhadap objek tertentu yang didapat melalui panca inderanya.

Menurut Slameto (2001: 26), opini seseorang terhadap suatu objek dapat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan

Kebutuhan terhadap sesuatu akan mempengaruhi opini seseorang terhadap objek. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga opini yang diberikan terhadap suatu objek juga akan berbeda. Ketika memberikan tanggapan terhadap sesuatu biasanya hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari suatu objek atau orang tertentu berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan dalam diri individu yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlainan dengan nilai dan keyakinan.

2. Penilaian

Penilaian seseorang terhadap suatu objek akan berkaitan erat dengan opini yang dimilikinya. Dalam hal ini opini tidak objektif, karena dalam proses

penilaian oleh seseorang pada umumnya didasarkan pada pengalaman, nilai dan keyakinan pribadi sehingga dalam memberikan tanggapan terhadap suatu objek perlu di lihat baik atau buruknya. Adalah sangat langka jika dapat memberikan tanggapan terhadap sesuatu secara sepenuhnya netral.

3. Penyimpulan

Opini dalam hal ini adalah proses psikologis yang mencakup proses penarikan kesimpulan terhadap suatu objek yang ditangkan oleh panca indera seseorang. Interpretasi yang di hasilkan melalui opini pada dasarnya adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Memberikan tanggapan terhadap makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang di tangkap oleh indra.

Menurut Slamento (2001: 23), yang mempengaruhi opini seseorang adalah sebagai berikut:

1. *Relation*. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua objek sama. Dengan adanya memfokuskan perhatian tersebut, akan terjadi opini antara mereka.
2. *Set*. Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seorang pelari yang siap digaris start terdapat set bahwa akan terdengar pistol.
3. *Sistem nilai*. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap opini seseorang.

2.1.2 Pengertian Opini Politik

Menurut Sjamsudin (1993: 7), pengertian opini politik pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai orientasi politik, yaitu merupakan cara pandang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap objek politik yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Opini politik setiap orang berbeda-beda sesuai dengan dari pengetahuan dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Selanjutnya menurut Sjamsudin (1993: 8), opini atau orientasi politik seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat membentuk, keseluruhan sikap masyarakat terhadap objek politik. Itulah yang muncul atau terpolakan ke atas permukaan sebagai opini politik masyarakat

Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya.

Menurut Goeltom dalam Mediastutie (2006: 15), opini atau orientasi politik adalah suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat membentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka untuk memandang suatu objek politik

Menurut Almond (1990: 35), opini politik seseorang dapat dilihat secara sistematis jika memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan apa yang dimiliki seorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat konstitusional dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini, dan bagaimana pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilainnya terhadap karakteristik yang sistemik tersebut?
2. Bagaimana pemahaman seorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan di dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat "*upward*"? bagaimana perasaan dan pendapatnya tentang segala struktur, dan individu-individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal tersebut?
3. Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijaksanaan yang "*downward*" struktur-struktur, individu-individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu?
4. Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang haknya, kekusaannya, kewajibannya dan strategi untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh? Bagaimana penilaiannya terhadap kemampuan norma-norma partisipasi dan penampilan apa yang diketahui dan dipergunakannya dalam membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan pendapatnya.

Menurut Almond (1990: 36-37), opini politik seseorang atau masyarakat berhubungan dengan empat macam obyek politik, yaitu:

1. Sistem politik secara keseluruhan

Meliputi antara lain: intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

2. Proses input

Meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakara untuk menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoritatif sifatnya dengan demikian proses input antara lain meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok kepentingan, dan alat komunikasi massa yang berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai sarana penampung berbagai tuntutan.

3. Proses output

Meliputi antara lain: intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan otoritatif. Singkatnya berkenaan dengan fungsi pembuatan peraturan/perundang-undangan oleh lembaga legislatif, fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (termasuk birokrasi) dan fungsi peradilan.

4. Diri sendiri

Meliputi antara lain: intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik. Dipersoalkan apakah yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya. Apakah yang bersangkutan dapat

memasuki lingkungan orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau bahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pengaruhnya sendiri. Kemudian lebih lanjut dipersoalkan kriteria apakah yang dipakai dalam membentuk pendapat dalam masyarakat atau sebagai seluruh sistem politik.

2.2 Masyarakat Desa

2.2.1 Pengertian Masyarakat

Menurut Soleman B. Taneko dalam Soerjono Soekanto (2002: 125), masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama. Masyarakat merupakan sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggotanya. Dengan kata lain bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia atau kemasyarakatan.

Menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (2002: 24), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan sistem dari kebiasaan atau tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia, keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat sebagai jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2002: 25), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan menempati suatu wilayah tertentu dan menjalankan hubungan diantaranya dengan menjalankan suatu fungsi-fungsi tertentu yang saling menentukan satu sama lain.

2.2.2 Pengertian Desa

Menurut Beratha (1982: 17), secara umum desa dapat diartikan sebagai tempat di mana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang dibandingkan dengan kota. Biasanya, dicirikan dengan bahasa Ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, maka pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Terdapat kesan kuat, pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.

Pengertian di atas menekankan bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota (bukan kota), desa adalah suatu komunitas kesatuan yang homogen dan desa merupakan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berada di pedalaman (terbelakang). Dalam pengertian ini terkandung unsur sosiologis, selain bias kota yang sangat kentara dan posisi marginal orang desa dalam wacana, merupakan konstruksi orang kota.

Selanjutnya menurut Beratha (1982: 18-19), beberapa ciri desa adalah:

1. Desa umumnya terletak di dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi) dan dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
2. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya

3. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat 'tergantung dari dirinya sendiri'
4. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan
5. Mempunyai tingkat homogenitas yang tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota

Sementara itu Roucek dan Warren (1962) dalam Raharjo (1999), menyebutkan karakteristik desa sebagai berikut:

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok/asosiasi
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
4. Homogen
5. Mobilitas sosial rendah
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
7. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar

2.2.3 Pengertian Masyarakat Desa

Menurut Beratha (1982: 19), secara etimologis pengertian masyarakat desa dapat disamakan dengan *rural community*, yaitu suatu kelompok manusia yang secara nyata ada maupun fiktif bertempat di wilayah *rural* (desa) di mana anggota-anggotanya memiliki kepentingan tertentu, mempunyai suatu kesamaan perasaan bahwa hanya dengan hidup demikianlah maka kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi.

Menurut Taliziduhu Ndraha (1991: 22), masyarakat desa (penduduk suatu desa) adalah setiap orang yang terdaftar sebagai suatu penduduk atau bertempat atau berkedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak soal di mana ia mencari nafkah. Masyarakat desa sinonim dengan *gemeinschaft* yaitu masyarakat paguyuban, persekutuan dan kerukunan, di mana hubungan antar manusia bersifat pribadi, kenal mengenal dengan akrab, sepahit-semanis, seduka-sesuka, disertai saling percaya mempercayai yang berakar pada kesatuan keturunan dan kesatuan keluarga, mempunyai kesatuan adat dan kepercayaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa yaitu sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu sebagai satu kesatuan hukum, terorganisir, memiliki lembaga baik formal maupun non formal, dan berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, serta memiliki ciri-ciri atau karakteristik khusus dan khas yang membedakannya dengan masyarakat lain.

2.2.4 Karakteristik Masyarakat Desa

Masyarakat desa selalu memiliki karakteristik dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak berlaku”.

Menurut Beratha (1982: 22-24), beberapa karakteristik masyarakat desa yang terkait dengan etika dan budaya adalah sebagai berikut:

a. Sederhana

Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan. Pada umumnya kesederhanaan ini terjadi karena secara ekonomi memang tidak mampu dan secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.

b. Mudah curiga

Secara umum, masyarakat desa akan menaruh curiga pada hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya dan seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap “asing”

c. Menjunjung tinggi “*unggah-ungguh*”

Sebagai “orang Timur”, orang desa sangat menjunjung tinggi kesopanan atau “*unggah-ungguh*” apabila:

- 1) Bertemu dengan tetangga
- 2) Berhadapan dengan pejabat
- 3) Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan
- 4) Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi
- 5) Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya

d. Lugas

Lugas atau berbicara apa adanya adalah ciri khas yang dimiliki masyarakat desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain karena mereka tidak berniat untuk menyakiti orang lain.

e. *Guyub*, kekeluargaan

Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam hati mereka

f. Perasaan “minder” terhadap orang kota

Satu fenomena yang ditunjukkan oleh masyarakat desa, baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul dengan orang kota adalah perasaan mindernya yang cukup besar. Biasanya mereka cenderung untuk diam/tidak banyak bicara.

g. Menghargai orang lain

Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya sebagai patokan untuk membalas budi sebesar-besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan sosial.

h. Jika diberi janji, akan selalu diingat

Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan seseorang/komunitas tertentu akan sangat diingat oleh mereka terlebih berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hal ini didasari oleh pengalaman/trauma yang selama ini mereka alami, khususnya terhadap janji-janji terkait dengan program pembangunan di daerahnya. Sebaliknya bila janji itu tidak ditepati, bagi mereka akan menjadi “luka dalam” yang begitu membekas di hati dan sulit menghapuskannya.

i. Suka gotong-royong

Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki di hampir seluruh Indonesia adalah gotong royong, tanpa harus dimintai pertolongan, serta merta mereka akan bahu-membahu meringankan beban tetangganya yang sedang

punya hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yang dikeluarkan untuk membantu orang lain. Prinsip mereka “lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan bertambah saudara”.

j. Demokratis

Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Peran BPD (Badan Perwakilan Desa) sangat penting dalam mengakomodasi pendapat/input dari warga.

k. Religius

Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan. Misalnya: Tahlilan, Rajaban dan Jum’at Kliwonan.

2.3 Kampanye

Menurut Firmanzah (2008), kampanye merupakan bagian dari pemasaran politik, di mana para peserta Pemilu melakukan berbagai kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya. Kampanye merupakan salah satu rangkaian kegiatan pemilu dalam rangka memperkenalkan dan menyosialisasikan diri dan program-program yang mereka tawarkan kepada masyarakat calon pemilih.

Sesuai dengan pengertian kampanye sebagai kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya, maka aktivitas kampanye dapat dinyatakan sebagai kegiatan sosialisasi politik.

Pernyataan tersebut didasarkan karena pada praktiknya peserta menyosialisasikan diri mereka sebagai pelaku politik dan program mereka sebagai program politik kepada masyarakat calon pemilih, untuk diketahui, dikenal dan dipilih pada saat pemungutan suara.

Menurut Miriam Budiardjo (2000: 115), sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik ke dalam suatu masyarakat. Almond juga menyatakan bahwa sosialisasi politik menyangkut dua hal. Pertama, bahwa sosialisasi politik berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang, dan yang ke dua bahwa sosialisasi politik dapat mengambil bentuk transmisi atau pengajaran yang langsung atau tidak langsung

Menurut Dawson dalam Miriam Budiardjo (2000: 116), sosialisai politik itu mengambil bentuk yang langsung maupun yang tidak langsung. Bentuk sosialisai politik yang langsung adalah menunjukkan kepada proses di mana hal-hal yang ditransmisikan atau disampaikan kepada generasi berikutnya, sedangkan dalam sosialisasi politik secara tidak langsung, seorang individu untuk pertama kalinya akan memperoleh atau mewarisi hal-hal yang bersifat non politis, dan pada gilirannya hal-hal yang diperolehnya tadi akan mempengaruhi pandangan-pandangannya, sikap-sikapnya, keyakinan-keyakinannya di bidang politik

Gabriel A. Almond dalam Miriam Budiardjo (2000: 118-120) menyatakan bahwa sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian ke budayaan dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula merubah kebudayaan politik.

Selanjutnya menurut Miriam Budiardjo (2000: 118-120), ada enam macam sarana atau agen sosialisasi politik, yaitu:

1. Keluarga

Merupakan lembaga yang pertama kalinya dijumpai oleh seorang individu. Sebab begitu manusia itu lahir maka manusia tersebut akan langsung berhadapan dengan keluarganya. Yang mana manusia itu akan dibentuk watak atau sikapnya untuk pertama kalinya.

2. Sekolah

Lembaga ini memegang peranan penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik, dengan kata lain sekolah memegang peranan penting dalam membentuk sikap warga negara.

3. Kelompok bergaul atau bermain

Kelompok bergaul dapat membentuk sikap-sikap politik seseorang. Contohnya seseorang akan tertarik pada masalah politik apabila teman-teman didalam kelompoknya tertarik kepada masalah politik. Jadi dapat dinyatakan bahwa kelompok bergaul atau bermain dalam mendorong mereka untuk menyesuaikan diri pada kelompoknya.

4. Pekerjaan

Organisasi yang yang dibentuk atas dasar pekerjaan dapat berfungsi sebagai saluran informasi tentang yang menyangkut masalah politik. Pekerjaan berfungsi juga sebagai penyuluh bagi anggotanya di bidang politik. Karena itu dinyatakan bahwa pekerjaan merupakan sarana sosialisasi bagi individu yang terlibat di dalamnya.

5. Media Massa

Melalui media massa masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi politik. Baik secara langsung dan maupun tidak langsung media massa merupakan sarana yang kuat untuk membentuk sikap dan keyakinan politik. Melalui media massa ideologi negara dapat ditanamkan kepada masyarakat dan dapat pula kebijaksanaan politik negara dapat diketahui oleh masyarakat.

6. Kontak-Kontak Politik Langsung

Merupakan suatu sarana sosialisasi politik. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis politik luar negeri, dan tanggapan agen-agen atau badan pemerintah terhadap tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaannya untuk patuh pada hukum

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

2.4.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 58 menyebutkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum
14. Mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
15. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
16. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
17. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, sebagaimana dikemukakan Amirudin (2003: 184-186), yaitu:

1. Kongkritisasi Demokrasi, dengan memberikan perspektif baru bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah akan memenuhi kaidah proses demokrasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural, proses Pemilihan Kepala Daerah diduga akan lebih beradab karena melibatkan unsur Partisipasi publik yang makin meluas dari bawah sesuai aspirasi masyarakat lokal. Di level kultural, proses Pemilihan Kepala Daerah memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.
2. Adanya kemungkinan kekerasan terhadap proses dan kekerasan terhadap data, sedikit berkurang.
3. Berkurangnya praktek premanisme politik uang. Jika Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, kemungkinan politik uang dapat diminimalisasi

Sementara itu kelemahan dari Pemilu sistem langsung adalah sebagai berikut:

1. Makin terpolarisasinya politik uang. Sistem Pemilu Langsung bukan berarti menjadi satu-satunya cara yang sanggup mengatasi pekatnya politik uang.
2. Kerawanan sosial politik. Jika politik uang tetap berjalan didukung dengan pengendalian diri dari bakal calon maupun massa pendukung yang rendah, sempurnalah kerawanan sosial potensial terlahir dalam sistem Pemilu secara langsung.

3. Problem kelembagaan politik yang baru. Pemilu langsung bukanlah harus dipahami sebatas bahwa ia merupakan mekanisme demokrasi yang paling otentik.

2.4.2 Fungsi Pemilihan Kepala Daerah

Muhammad A.S. Hikam (2002), menyebutkan setidaknya ada empat fungsi terpenting Pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Legitimasi politik

Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah selaku *decision maker* akan memperoleh dukungan atau sanksi yang kuat, karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat, bukan pemaksaan.

2. Sirkulasi elit politik

Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa Pemilu memiliki fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintahnya.

3. Pendidikan politik

Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara

berkiprah dalam sistem demokrasi. Sehingga pada tataran selanjutnya akan mengakar pemahaman bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara.

2.5 Kerangka Pikir

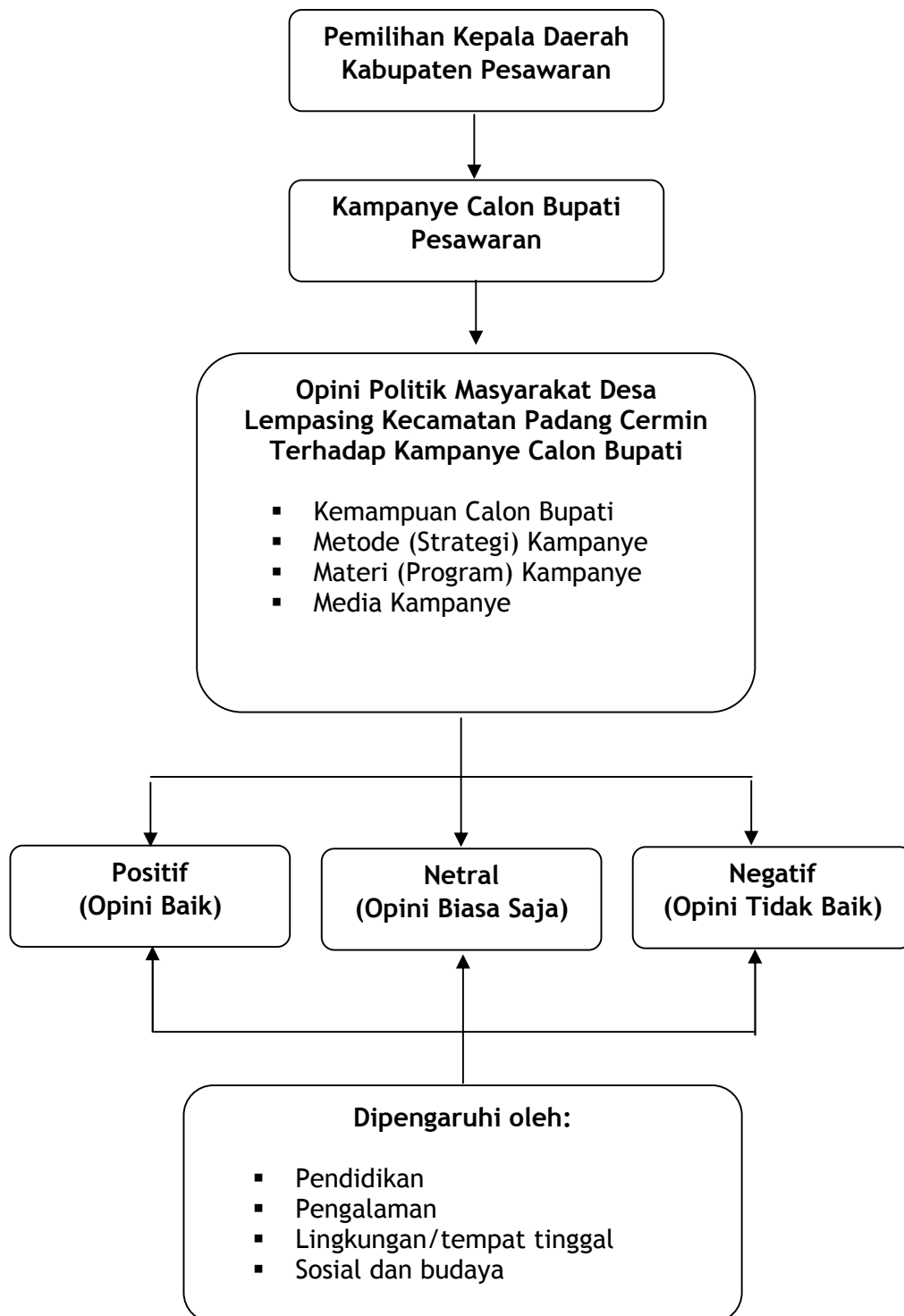
Pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang pada hari pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala daerah, agar para pemilih benar-benar mengetahui dan mengenal calon dan partai yang akan mereka pilih.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut memiliki arti bahwa suara rakyat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Hal ini penting bagi partai politik, karena mau tidak mau partai politik berkewajiban mendengar dan merespon dengan tepat suara rakyat jika ingin masih tetap eksis dan berperan dalam percaturan pemerintahan dan politik. Upaya secara alamiah untuk memberdayakan partai politik menjadi penting untuk membentuk partai menjadi lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi kerakyatan.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, setiap calon kepala daerah, partai politik dan tim suksesnya berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi mengenai diri dan program yang mereka tawarkan atau lazim disebut dengan kampanye. Melalui proses kampanye, masyarakat calon pemilih memiliki kesempatan maksimal untuk mendapatkan informasi kepala daerah, sebagai dasar bagi mereka dalam menentukan pilihan.

Pelaksanaan kampanye memiliki tujuan tertentu, yakni agar masyarakat sebagai pemilih memiliki pengetahuan, kesadaran dan pemahaman sampai pada akhirnya diharapkan mereka akan menjatuhkan pilihan dengan memberikan suara mereka pada calon kepala daerah dan partai politik tertentu. Sebelum sampai pada tahap pemberian, kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah ini tentunya akan mendapat tanggapan secara beragam dari masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda sebagai sasaran kampanye. Tanggapan atau opini tersebut dapat ditujukan pada aktivitas kampanye yang meliputi metode kampanye, materi kampanye, waktu kampanye dan program-program politik yang ditawarkan dalam kampanye.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggambarkan opini politik masyarakat Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terhadap kampanye calon-calon Bupati Pesawaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2001: 112), hipotesis berasal dari Bahasa Latin yaitu *hypo* yang berarti dugaan dan *thesis* yang berarti dalil. Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah dan bersifat sementara, sehingga harus diuji kebenarannya melalui penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Terdapat pengaruh positif antara kampanye calon-calon Bupati Pesawaran terhadap opini politik masyarakat Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”